



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1115/DJU/SK.TI.1.1/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA TINGKAT PUSAT DAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN
PERADILAN UMUM TAHUN 2026

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum, diperlukan penguatan pengelolaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. bahwa seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum sudah menerapkan Sistem Informasi penelusuran Perkara (SIPP) dalam pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi persidangan;
- c. bahwa seiring adanya pembaharuan yang terus dilakukan untuk penyempurnaan SIPP dan adanya permasalahan teknis dalam penerapan SIPP, serta untuk memastikan keseragaman penerapan, optimalisasi fungsi, pemutakhiran data, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, diperlukan koordinasi yang terstruktur dan terintegrasi melalui Satuan Tugas Sistem Informasi penelusuran Perkara (SATGAS SIPP);
- d. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1052/DJU/SK.T11.1.VI/2025 tentang



pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) tingkat pusat dan Pengadilan tingkat banding di Lingkungan peradilan Umum Tahun 2025 sudah tidak sesuai, seiring adanya perpindahan tugas Anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pusat dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum;
- f. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;



5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik ;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA TINGKAT PUSAT



DAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pusat dan Tingkat Banding pada Pengadilan, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pusat mempunyai tugas :

1. Kesekretariatan :

- a. Menyiapkan kebutuhan kegiatan Satuan Tugas Sistem Informasi Perkara (SATGAS SIPP);
- b. Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- c. Menghimpun *review* atau kajian terhadap aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan publikasi terhadap *Frequently Asked Question (FAQ)* pada media yang telah ditentukan;
- e. Memfasilitasi pertemuan antara anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;

2. Divisi Kajian :

- a. Melakukan *review* atau kajian dan membuat rekomendasi terhadap fasilitas yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui media yang telah ditentukan;
- c. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknis Aplikasi untuk membuat rekomendasi kebijakan terhadap implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);



- e. Membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

3. Divisi Teknis Aplikasi :

- a. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Tingkat Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui media yang telah ditentukan;
- b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berdasarkan laporan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
- c. Melakukan koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat rekomendasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- e. Membuat dan mengembangkan tools/alat bantu monitoring dan evaluasi dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk mendukung register elektronik;
- f. Melakukan Koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding mempunyai tugas:

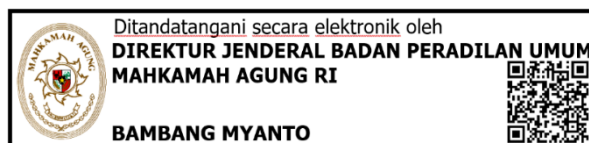
- 1. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) baik di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
- 2. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- 3. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya;



4. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
5. Melakukan rapat koordinasi Satgas SIPP Pengadilan Tingkat Banding dengan Satgas SIPP seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya minimal 1 kali dalam setahun;
6. Membuat laporan implementasi, permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Melakukan koordinasi dengan Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Badan Peradilan Umum;
8. Memonitor kesiapan Pengadilan Negeri untuk penerapan register elektronik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Februari 2026



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum;



**DAFTAR NAMA
SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
(SATGAS SIPP)**

NO.	N A M A	JABATAN	POSISI DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	H. Bambang Myanto, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Pembina
2.	Zahlisa Vitalita, S.H., M.H	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Ketua Satgas
3.	Budi Setioko, S.H., M.H.	Kasubdit Statistik dan Dokumentasi	Sekretaris Satgas
KESEKRETARIATAN			
4.	Lies Khadijah, S.H., M.H.	Kasubdit Bimbingan dan Monitoring	Koordinator
5.	Aditya Widyartadi, S.Kom	Kepala Seksi Statistik	Wakil Koordinator
6.	Misra Dewita, S.H., M.H	Kepala Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum	Anggota
7.	Reni Kartini, S.H.	Kepala Seksi Pelayanan Pengadilan	Anggota
8.	Marthinalova Noll, S.Kom	Penata Layanan Operasional - Seksi Bimbingan I	Anggota
9.	Chintya Amanda, S.H.	Analisis Perkara Peradilan - Seksi Sarana Kerja Pengadilan	Anggota
10.	Wahyu, A.Md	Teknisi Sarana dan Prasarana - Seksi Monitoring dan Evaluasi	Anggota
11.	Pratiwi Rope, S.E	Arsiparis - Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum	Anggota
12.	Yayan Adi Putra, A.Md.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Tata Usaha Badilum	Anggota
DIVISI KAJIAN			
13.	Muhammad Damis, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar	Koordinator
14.	Dr. Suprpti, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Wakil Koordinator I
15.	Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan	Wakil Koordinator II



NO.	N A M A	JABATAN	POSISI DALAM TIM
16.	Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
17.	I Made Pasek, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar	Anggota
18.	Dedeh Suryanti, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
19.	Mien Trisnawaty, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta	Anggota
20.	Achmad Guntur, S.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Anggota
21	Mustamin, SH., MH.	Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Anggota
22.	Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Anggota
23.	Candra, S.H.	Kasubdit Tata Kelola	Anggota
24.	Yohanes Fransiscus Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Anggota
25.	Achmad Basyari, S.E.	Kepala Seksi Bimbingan I	Anggota
26.	Ani Windarti, S.H., M.B.A.	Panitera Pengadilan Negeri Wonosari	Anggota
27.	Muhammad Yusuf Shalahuddin, ST, S.H., M.H.	Panitera Muda Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Anggota
DIVISI TEKNIS APLIKASI			
28.	Jhon Hendriansyah, S.H.	Panitera Muda Khusus PHI Pengadilan Negeri Jambi	Koordinator
29.	Roby Hidayat, S.T	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tinggi Riau	Anggota
30.	Fransisco Palang Ama, S.T.	Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang	Anggota
31.	Aris Susilo, S.T.	Sekretaris Pengadilan Negeri Madiun	Anggota
32.	H. Dona Panambayan, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota
33.	Marisa Eka Putra, S.T., M.Eng	Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkayang	Anggota



NO.	N A M A	JABATAN	POSISI DALAM TIM
34.	Oktein Josepus Susak, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi	Anggota
35.	Yenny Viky Effendy, ST, S.H., M.Eng.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Yogyakarta	Anggota
36.	Imam Maxudi, S.Kom	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	Anggota
37.	Ita Masyita, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota
38.	Adityo Nugroho, S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Surabaya	Anggota
39.	Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom, S.H, M.H	Kepala Seksi Tata Persidangan	Anggota
40.	Oktaviandi Wahyu Nugroho, S.T.	Kepala Seksi Bimbingan II	Anggota
41.	Faizal A. Djau, S.SI	Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Gorontalo	Anggota
42.	Zeno Dani Kuncoro, ST.	Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Anggota
43.	Dodon Angin Wiyono, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Badilum	Anggota
44.	Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama Badilum	Anggota
45.	Adven Edo Prasetya, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama Badilum	Anggota
46.	Didik Irfan Setiawan, Amd.Kom.	Pengolah Data dan Informasi Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Mojokerto	Anggota
47.	Puji Wiyono, S.Kom	Operator – Penata Layanan Operasional pada Pengadilan Negeri Klaten	Anggota
48.	Yuli Harianto, S.Kom	Operator – Penata Layanan Operasional pada Pengadilan Tinggi Makassar	Anggota
49.	Welem Raja	Pengadministrasi Perkantoran, Seksi Monitoring dan Evaluasi Badilum	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO





**DAFTAR NAMA
SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
PENGADILAN TINGGI (SATGAS SIPP PT)**

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Irwan Efendi, S.H., M.Hum.	196505041992121001	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2.	Ayumi Susriani, S.H., M.H.	197106061996032001	
3.	Sigit Pramono Ginting, A.Md.T.	199812282020121003	
4.	Heri, A.Md	199006242020121004	
5.	Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.	196012301985031006	Pengadilan Tinggi Medan
6.	Hendri Tobing, S.H., M.H.	196505171992121001	
7.	Candra Arris Saputra, S.Kom	199103242015031003	
8.	Muhammad Yassir Rangkuti, A.Md	199002192019031007	
9.	Masrizal, S.H., M.H.	196111111988031004	Pengadilan Tinggi Padang
10.	Jon Effredi, S.H., M.H	196404021985031005	
11.	Reflison Agosto, S.Kom	198808262015031002	
12.	Alvurqoni Ariven Yutzky, S.Kom.	199701302025061013	
13.	Jumongkas L. Gaol, S.H., M.H.	196109121988031003	Pengadilan Tinggi Riau
14.	Sukri Sulumin, S.H., M.H.	196308171992121001	
15.	Fadhliamin, S.Si	199102062015031003	
16.	Melgisaputra Dwi Nanda, S.Kom., M.Kom	199303102020121005	
17.	Abu Hanifah, S.H., M.H.	196704291996031001	Pengadilan Tinggi Jambi



NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Melfiharyati, S.H., M.H.	196802161992122001	
19.	Riri Indriati Purba, S.Kom	199006172015032002	
20.	Aryono Digdo Prabowo, S.T.	199103092015031003	
21.	R.A Suharni, S.H., M.H	196102121986122001	Pengadilan Tinggi Palembang
22.	Putut Tri Sunarko, S.H., M.H	196803181992121001	
23.	Muhammad Fadhli, A.Md	199410152020121006	
24.	Tarisa Aprilliani, S.H	200009052024052001	
25.	Arman Surya Putra, S.H., M.H.	197411181999031001	Pengadilan Tinggi Bengkulu
26.	Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H	196607241994032005	
27.	Agief Muftahid, S.Kom	199702182020121006	
28.	Fandy Juniario Simorangkir, S.Kom.	199306242019031004	
29.	Antonius Simbolon, S.H., M.H.	196202081988031002	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
30.	Nunsuhaini, S.H., M.Hum	196508071985032002	
31.	Eko Dwi Wibowo, S.Kom., M.T.I.	199102092015031005	
32.	Isnani Kurnia Putri, S.Kom	199108202015032004	
33.	Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.	196305251992122001	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
34.	Sri Suharini, S.H., M.H	196612171992122001	
35.	Agustini, S.Kom.	198408122009042007	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
36.	Merry Tantri Millenia Tobing, S.Kom.	200101022025062015	



NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
37.	Yuda Haryanto, A.Md.	198001052025211036	
38.	Sutarto, S.H., M.Hum.	196009041988031005	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
39.	Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.	196101151985121001	
40.	Muhammad Wildan Fakhrezi, S. Ak	199705112022031006	
41.	Iqbal Sukron Maulana, S.Kom.	199806022025061007	
42.	Saryana, S.H., M.H..	196103021986121001	Pengadilan Tinggi Bandung
43.	Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H	196210301988031003	
44.	Devira Wiena Pramintya, S.Kom	199512152020122014	
45.	Tia Adistian Pasha, S.T.	198405272011011012	
46.	Dr. Suhartanto, S.H., M.H.	196102281985121001	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
47.	Dr. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.	196206241986122001	
48.	Erlangga Narendra Perdana, S.Kom	199106072020121003	
49.	Hanung Marvieanto Nugroho, A.Md.	199203242020121003	
50.	Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.	196107051987021001	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
51.	Harini, S.H., M.H.	196012261986122001	
52.	Mochamad Badi` Romadloni, A.Md	199502132019031007	
53.	Erwin Fajar Saputra	199309062025211053	
54.	Suhartanto, S.H., M.H.	196412081989031003	Pengadilan Tinggi Surabaya
55.	Sudarwin, S.H., M.H.	196111031988031002	



NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
56.	Moch. Agus, S.Kom.	198908252020121005	
57.	Rista Nur Aini, A.Md.T.	199708052020122005	
58.	Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.	196306161988031002	
59.	Inrawaldi, S.H., M.H.	196210211988031001	Pengadilan Tinggi Banten
60.	Bobby Ertanto, S.H.	198704252006041002	
61.	Pribadi Hutomo Putro, S.Kom	199303112025211047	
62.	Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.	196312051988031004	Pengadilan Tinggi Denpasar
63.	Hj. Hera Kartiningsih, S.H., M.H	196404211992122001	
64.	I Gede Kartika Aryasa, S.T	197604212009041002	
65.	I Ketut Suharsana, S.Kom, M.Kom	198201162009121001	
66.	Gede Ariawan, S.H. M.H.	196107201988031006	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
67.	Siti Hamidah, S.H., M.H.	196602281992122001	
68.	Ichwan Setiawan, S.T.	198705262011011006	
69.	Satria Buana, A.Md	198403272011011011	
70.	Sutikna, S.H., M.H.	196508251996031002	Pengadilan Tinggi Kupang
71.	Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.	196701201993032003	
72.	Feby Mariane Malelak, S.Kom	198402202009042006	
73.	Rian Fedrianto, S.Kom.	199001092020121003	
74.	Sudira, S.H., M.H.	196408141992121001	Pengadilan Tinggi Pontianak



NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
75.	Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.	197105021996032001	
76.	Dwi Wahyu Prasetyo, S.Kom.	198507052011011006	
77.	Haerudin Soyan Pratama, S.H.	200104272024051002	
78.	Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.	196705231993032002	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
79.	Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.	196903061991032004	
80.	Yogi Nugraha Putra, S.Kom.	199409182019031009	
81.	Roberto Asintongan P., S.Kom.	198802062019031003	
82.	Dr. Made Sukereni, S.H., M.H.	196403031985032004	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
83.	Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.	196711291992121001	
84.	Okta Pilopa, A.Md.	199210272020121002	
85.	Deffi Qurroti A`Yunin Rofik, A.Md	199609242020122003	
86.	Agung Purbantoro, S.H., M.H.	196410151992121001	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
87.	Irfanudin, S.H., M.H.	196308081992121001	
88.	Dewi Adi Kusumastuti, S.H.	200006252024052001	
89.	Debora Margaret Pakpahan, A.Md.	200003232025062012	
90.	Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.	196706291992121001	Pengadilan Tinggi Manado
91.	R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.	196609271992122001	
92.	Retzi Yosia Lewu, S.T, M.Kom	198203092009122002	
93.	Pelita Santi, S.T	199802192020122003	



NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
94.	Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.	196709031992121001	Pengadilan Tinggi Palu
95.	Yuli Effendi, S.H., M.Hum.	196307201992121001	
96.	Rahmat Safrin Domut, S.SI, S.T	198410302009121004	
97.	Andy Yuliansyah, A.Md	199007292020121004	
98.	Dwi Purwadi, S.H., M.H.	196104231986031003	Pengadilan Tinggi Makassar
99.	Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H.	197602171999031004	
100.	Nur Alqadri, A.Md.	198905252019031005	
101.	Yuli Harianto	198707212025211047	
102.	Muhamad Sirad, S.H., M.H.	196211051989031005	Pengadilan Tinggi Kendari
103.	Dasriwati, S.H.	196704261992122001	
104.	Gilang Erlambang, A.Md	198906272019031003	
105.	Aldo Fernanda Hadid, S.Kom.	200006122025061015	
106.	Bambang Sucipto, S.H., M.H	196505291992121001	Pengadilan Tinggi Gorontalo
107.	Haruno Patriadi, S.H., M.H.	196509201987031003	
108.	Faizal A. Djau, S.SI	198605232011011008	
109.	Caerel Steven Chandra Ardhana, S.T.	200011192025061012	
110.	Leba Max Nandoko Rohi, S.H	196803031992121003	Pengadilan Tinggi Ambon
111.	Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.	196805191994032003	
112.	Mohamad Nurul Aripin, S.H.	199801262024051001	



NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
113.	Guna Dermawan, S.Kom.	200003102025061011	
114.	Sutarno, S.H., M.Hum.	196507211996031001	Pengadilan Tinggi Maluku Utara
115.	Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.	196111071985031009	
116.	Syahrudin, S.Kom.	198710192011011003	
117.	Perih Hadi, S.H.	199103212025211035	
118.	Tornado Edmawan, S.H., M.H.	196310231996031001	Pengadilan Tinggi Jayapura
119.	Buyung Dwikora, S.H, M.H.	196405031992121001	
120.	Aditya Putra Setia Sinaga, A.Md.	199604192019041001	
121.	Said Aqiel Siroj, S.H.	199909162024051001	
122.	Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	196701271992121001	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
123.	Dominggus Silaban, S.H., M.H.	196506261992121001	
124.	Muhammad Alim Abadi, S.H	198611192012121001	
125.	Muhammad Rizki Agustria Pengestu, A.Md.T.	199805042020121004	
126.	Bagus Irawan, S.H., M.H	196308261988031003	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
127.	Wendra Rais, S.H., M.H.	196506301992121001	
128.	Rahmad Fahrozi, S.Kom., M.Kom	198603292015031001	
129.	Santo Barri Gultom, S.H.	199305302024051001	
130.	Dr. Gutiarso, S.H., M.H.	196605081992121001	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
131.	Khairulludin, S.H., M.H.	196412021996031001	



NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
132.	Wawan, S.Kom	-	
133.	Tri Mardiyanto	-	
134.	Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.	196208241992121001	Pengadilan Tinggi Papua Barat
135.	Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.	196611161992121001	
136.	Alfrids Tanga, S.T., M.M.	198110162009041003	
137.	Eka Rani R. Manuputty, S.T	198804032009122003	



Ditandatangani secara elektronik oleh

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO



